

**KONSTRUKSI KESADARAN BURUH TENTANG HAK BURUH  
(Studi Peran FSPMI dalam Gerakan Buruh di Pasuruan)**

***Labour Knowledge Construction Regarding Labour Rights  
(Study of FSPMI in Labour Movement at Pasuruan)***

Muqtafiah, Maulana Surya Kusumah  
Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember  
Email: [maulanask@gmail.com](mailto:maulanask@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Demonstrations carried out by workers represent the construction of labor awareness. FSPMI supports the awareness-building process. The researcher focused this research on how awareness construction was carried out by FSPMI. FSPMI not only mobilizes workers to carry out demonstrations but also builds labor' awareness regarding labor rights, work relations, both related to regulations and systems or other labor issues. By using a qualitative research design, the description or review provided is descriptive. Researchers also use the constructivist approach. This constructivism approach becomes essential because to know about how the construction process is carried out by FSPMI, a further and in-depth approach is needed. The results showed that the process of building labor' awareness in the FSPMI labor association was carried out through education. FSPMI carried out its activities through several stages called (CLA) concept-lobby-action. The construction produced through education makes labors more aware of their rights and is also involved in politics. Construction carried out through education has created critical awareness of workers.*

**Keywords:** *Awareness Construction, Labor Rights, Labor Movement, Role of FSPM*



## ABSTRAK

Demonstrasi yang dilakukan oleh buruh mewakili konstruksi kesadaran buruh. Proses pembangunan kesadaran didukung oleh FSPMI. Peneliti menfokuskan penelitian ini pada bagaimanakah konstruksi kesadaran yang dilakukan oleh FSPMI. FSPMI tidak hanya memobilisasi buruh untuk melakukan aksi demo, melainkan juga membangun kesadaran buruh terkait hak-hak buruh, relasi kerja, baik itu berkaitan dengan regulasi dan sistem ataupun isu-isu perburuhan yang lain. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, penjabaran atau ulasan yang diberikan bersifat deskriptif. Peneliti juga menggunakan pendekatan konstruktivisme, pendekatan konstruktivisme ini menjadi penting karna untuk mengetahui tentang bagaimana proses konstruksi yang dilakukan oleh FSPMI, diperlukan adanya pendekatan yang lebih lanjut dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembangunan kesadaran pekerja dalam asosiasi buruh FSPMI dilakukan melalui pendidikan. FSPMI melaksanakan aksinya melalui beberapa tahapan yang disebut (KLA) konsep-lobby-aksi. Konstruksi yang dihasilkan melalui pendidikan membuat pekerja lebih sadar akan hak-hak mereka dan juga terlibat dalam politik. Konstruksi yang dilakukan melalui pendidikan telah menciptakan kesadaran kritis pekerja.

**Kata Kunci:** Konstruksi Kesadaran, Hak Buruh, Gerakan Buruh, Peran FSPMI



## Pendahuluan

Kabupaten Pasuruan selain memiliki potensi pertanian yang baik, juga dikenal dengan daerah kawasan industri. Kabupaten Pasuruan memiliki kawasan industri yakni PIER atau Pasuruan Industrial Estate Rembang. Padatnya industri di Kabupaten Pasuruan menjadikan UMK Daerah tersebut terbilang tinggi yakni Rp. 3.037.500. Upah minimum yang tinggi di Kabupaten Pasuruan tindak lantak menjamin kesejahteraan buruh itu sendiri. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang menyebutkan bahwa penentuan upah buruh berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Kebijakan pengupahan tidak lagi mempertimbangkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Kebijakan tersebut memperburuk posisi buruh, yang mana buruh tidak lagi memiliki posisi aman dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak selamanya berbanding terbalik dengan inflasi, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak menjamin terhadap rendahnya inflasi. Upah merupakan persoalan krusial bagi buruh, hal ini dikarenakan upah merupakan tujuan utama buruh dalam bekerja. Upah merupakan salah satu hak yang seringkali menjadi persoalan bagi buruh. Buruh di Kabupaten Pasuruan seringkali melakukan aksi untuk memperjuangkan hak-hak nya. Aksi ini sebagai bentuk perlawanan buruh atas permasalahan yang sedang dihadapi, yang dalam setiap aksinya buruh selalu membawa isu dan tuntutan tertentu.

**Tabel Aksi Demo Buruh Pasuruan 2015**

No	Tanggal	Pelaku Aksi	Tuntutan Aksi
1	10/3/2015	Buruh PT Surya Delta Textile	Hak-hak normative yang tak kunjung dipenuhi oleh perusahaan sejak 2013, yakni : upah buruh yang dibayarkan jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten.
2	14/4/2015	Buruh PT Surabaya Rending Plastik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji buruh yang tidak dibayar selama 3 bulan</li> <li>• Menagih uang THR yang hanya dibayarkan separuh</li> <li>• Tidak terdaftarnya buruh dalam BPJS Kabupaten Pasuruan</li> </ul>
3	01/5/2015	SARBUMUSI	Buruh menuntut adanya Pengadilan Hukum Industrial atau PHI di Kabupaten Pasuruan
4	06/7/2015	Buruh PT Surya Delta Textile	Pembebasan terhadap 11 karyawan PT Destex yang dinilai anarkis dalam demo yang dilakukan pada bulan Maret lalu
5	06/8/2015	Buruh PT Halim Jaya Sakti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upah yang dibayarkan jauh dibawah UMSK Kabupaten Pasuruan</li> <li>• Tidak adanya asosiasi serikat pekerja pada Pabrik</li> <li>• Tidak adanya jaminan kesehatan (BPJS)</li> </ul>
No	Tanggal	Pelaku Aksi	Tuntutan Aksi
6	31/8/2015	Serikat Buruh PT Nestle	Gaji buruh yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja bersama atau PKB
7	26/11/2015	SARBUMUSI	meminta pihak Disnakertrans Kabupaten Pasuruan untuk menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya



8	20/10/ 2015	FSPMI	Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang ada di Ring 1 Jatim menolak rencana pemerintah dalam pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan untuk menerapkan Kenaikan Upah Minimum
---	----------------	-------	---

Sumber : (Yoenianto. 2015) (Marza. 2015) (Syairwan. 2015) (Hujjah. 2015) (Handik. 2015) (Hartik. 2015) (Hujjah. 2015) (<http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/ribuanburuh-jatim-tolak-rencana-pemerintah-tetapkan-rpp-pengupahan>) diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh buruh, sebagian besar melibatkan adanya serikat pekerja. Serikat pekerja menurut Sumanto (2014:79) adalah asosiasi para buruh yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial buruh. Di Kabupaten Pasuruan terdapat 14 organisasi serikat pekerja FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) merupakan salah satu serikat pekerja di Kabupaten Pasuruan yang dikenal sering melakukan aksi.

FSPMI seringkali melakukan aksinya ditingkat Provinsi dengan membawa isu wilayah, dan jarang melakukan aksi ditingkat kabupaten. FSPMI sebagai organisasi serikat pekerja melakukan pendampingan terhadap masalah yang dihadapi buruh, yang mana Sebelum melakukan aksi demo, terlebih dulu dilakukan pengonsepan, apakah isu atau masalah tersebut bisa diselesaikan dengan lobby atau tidak, jika memang tidak bisa diselesaikan dengan lobby maka FSPMI akan melakukan aksi. Peneliti menfokuskan penelitian ini pada bagaimana konstruksi kesadaran yang dilakukan oleh FSPMI, yang mana FSPMI tidak hanya memobilisasi buruh untuk melakukan aksi demo, melainkan juga membangun kesadaran buruh, dengan memberikan pengetahuan terkait hak-hak buruh.

## Pembahasan

### 1. Proses Konstruksi Kesadaran Buruh: Peran-Peran dalam Konstruksi Kesadaran Buruh

Kehidupan buruh tidak terlepas dari dunia sosialnya. Bagaimana sistem sosial mempengaruhi buruh dan kesadarannya. Buruh tidak bisa hidup secara individual, melainkan hidup beriringan dengan pihak-pihak yang tanpa disadarai mempengaruhi terhadap kesadarannya. Kesadaran buruh ini dideterminasi oleh tempat dimana dirinya tinggal. Kehidupan buruh tidak terpisahkan dari tempat dimana buruh bekerja yakni pabrik, sebagian besar waktu buruh dihabiskan di dalam pabrik. Sosialisasi yang dilakukan buruh lebih banyak berada pada wilayah perusahaan,



daripada di tengah-tengah masyarakat ataupun keluarga. Di dalam Perusahaan atau pabrik, tidak hanya terdapat relasi antara buruh-pengusaha melainkan juga antara buruh-serikat. Interaksi dan komunikasi yang terbangun dari kedua relasi tersebut mempengaruhi keputusan buruh, apakah buruh akan menjadi pekerja saja atau ikut bergabung dengan serikat. Buruh menentukan realitas berdasarkan yang dikehendakinya. Relasi yang terbangun dalam diri buruh mempengaruhi terhadap kesadarannya, yang mana kesadaran buruh ini menjadi area pertarungan dari dua kepentingan, yakni pengusaha dan serikat. Pengusaha selaku pemilik modal menginginkan agar buruh sepenuhnya patuh terhadap peraturan yang diterapkan pengusaha, sedangkan serikat pekerja FSPMI menginginkan agar buruh berani melakukan perlawanan terhadap kebijakan pengusaha yang menyimpang dari Undang-Undang.

#### ***a. Peran Pengusaha***

Sebagian besar waktu buruh di dihabiskan di dalam pabrik, hal ini menjadikan buruh terbiasa dengan hubungan sosial yang terjalin di dalamnya, yang mana relasi kerja yang terbangun antara pengusaha dan buruh sifatnya top-down. Pengusaha selaku pemilik modal memiliki kewenangan atas regulasi yang akan diterapkan di perusahaan. Kebijakan yang diciptakan pemerintah secara umum, belum tentu dijalankan oleh perusahaan, seperti contoh PERDA Kabupaten Pasuruan.

Pengusaha terkesan menunda-nunda dalam menerapkan kebijakan Perda Pasuruan No 22 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan. Kebijakan yang sudah diuji materi tersebut sengaja tidak dijalankan oleh pengusaha dengan alasan menunggu keputusan MA. Hal ini mengharuskan buruh untuk melalui tahap-tahap tertentu, agar kebijakan tersebut dapat diterapkan yakni dengan meminta surat rekomendasi ke Mendagri. Buruh harus melalui proses panjang untuk bisa memberikan bukti terkait legalitas kebijakan tersebut. Pengusaha dan buruh seharusnya dapat bekerja sama dalam relasi kerja, bagaimana hubungan sosial tersebut dibangun sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha membutuhkan tenaga buruh dalam proses produksi begitupun buruh yang membutuhkan pengusaha dalam mendapatkan pekerjaan, namun yang terjadi pengusaha tidak menjalankan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kebijakan yang tidak diterapkan oleh pengusaha ini menjadikan buruh untuk melakukan perlawanan atau tindakan. Perlawanan tersebut sebagai buah dari kesadaran kritis yang dimiliki buruh, yang mana buruh tidak bisa menerima begitu saja tindakan pengusaha yang



menyimpang dari Undang-Undang. Kesadaran kritis yang dimiliki buruh dianggap mengkhawatirkan posisi pengusaha sehingga pengusaha melakukan berbagai upaya dalam melemahkan kesadaran buruh. Pengusaha melakukan upaya dalam melemahkan kekuatan buruh salah satunya mengiming-imingi buruh naik jabatan dengan syarat harus keluar dari serikat.

Tawaran yang dilakukan pengusaha ini bertujuan untuk mengalihkan buruh dari kesadaran kritisnya, yakni agar orientasi buruh hanya kepada uang sehingga tidak melakukan perlawanan terhadap regulasi yang diterapkan pengusaha. Cara-cara yang dilakukan pengusaha mengarah pada dominasi, dimana buruh digiring kesadarannya pada kesadaran semu.

Bentuk reward yang diberikan pengusaha menjadikan buruh berfikir pragmatis yakni hanya berorientasi uang, kesadaran kritis yang dimiliki buruh dalam serikat sengaja dilemahkan dengan mengiming-imingi buruh naik jabatan. Pengusaha memberikan reward berupa kenaikan jabatan bagi buruh yang memiliki cukup pengaruh dalam serikat, hal ini menjadikan buruh tidak memiliki kesadaran kritis karena ketika buruh mengiyakan reward tersebut, itu artinya buruh menjadi bagian dari pengusaha sehingga buruh tidak boleh menggugat kebijakan yang berlawanan dari pengusaha. Padahal serikat adalah wadah dalam menampung kebersatuan buruh. Keberadaan serikat menjadi sesuatu hal yang ditakuti oleh pengusaha sehingga keberadaannya kalau bisa ditekan dan dikendalikan.

Tindakan yang dilakukan pengusaha bertujuan untuk mengalihkan kesadaran buruh sehingga buruh tidak bisa bersatu. Pengusaha melakukan upaya dalam melemahkan kekuatan buruh seperti mengintimidasi buruh yang ikut serikat. Kekuatan buruh dianggap mengkhawatirkan pengusaha, sehingga pengusaha melakukan upaya dalam menghalang-halangnya. Bentuk penghalang-halangan tersebut menurut pak J ada yang sifatnya enak dan tidak enak. Enak dan tidak enak ini sebagai bentuk ungkapan yang didasarkan atas reaksi pengusaha, contoh yang tidak enak adalah bentuk intimidasi bagi buruh yang akan mengikuti serikat, bentuk intimidasi tersebut seakan mencitrakan bahwa keputusan buruh ikut organisasi adalah salah, sehingga buruh mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pengusaha. Sedangkan bentuk penghalang yang lain adalah reward bagi buruh.

Pengusaha memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan apa yang akan diterapkan dalam



relasi kerja. Meskipun itu hak buruh tapi pengusaha tidak selalu memberikannya, hal ini menjadikan buruh teralienasi dari hak-haknya, dimana buruh tidak menerima hak yang seharusnya didapatkan. Pengusaha sebagai pemilik modal berkuasa atas kebijakan dalam relasi kerja. Kebijakan yang tidak sesuai Undang-Undang mau tak mau harus diterima buruh seperti contoh kebijakan mengenai upah, yang mana dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sudah diatur dengan jelas bahwa upah yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak buruh yakni untuk pekerja lajang, artinya bagi pekerja yang sudah berkeluarga dan masa kerja di atas satu tahun mendapatkan tambahan upah lebih besar dari KHL. Kebijakan yang sudah tertera jelas di undang-undang tersebut dalam prakteknya masih belum diterapkan secara maksimal oleh pengusaha.

Peraturan Daerah atau Perda Pasuruan Pasal 37 No 4 juga menyebutkan bahwa pengusaha wajib menaikkan upah minimum bagi pekerja yang sudah menikah atau berkeluarga dan sudah memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih sekurang-kurangnya 5% lebih besar dari upah minimum Kabupaten yang berlaku. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa upah yang diterima buruh lajang dan menikah adalah sama, tidak ada perbedaan. Menurut Pak A kondisi demikian telah mengkebiri hak-hak buruh, yang mana buruh dipaksa menerima keadaan yang tidak sesuai dengan seharusnya, buruh dihadapkan pada pilihan yang pada akhirnya dia harus menerima begitu saja realitas tersebut, daripada buruh kehilangan pekerjaan. Hak-hak buruh terkait upah sudah diatur jelas dalam Peraturan Daerah, 5% uang tambahan nyatanya masih belum dirasakan buruh.

Pak A adalah pekerja yang sudah menikah dan masa kerjanya mencapai 16 tahun. Status pak A yang sudah menikah dan masa kerja diatas satu tahun tidak membedakan upah yang diterimanya dari upah buruh lain yang masih lajang, menurut pak A perbedaannya hanya terletak pada tunjangan saja seperti tunjangan BPJS yang mana untuk buruh yang sudah menikah anak istrinya dapat didaftarkan untuk mendapatkan tunjangan BPJS. Perundingan upah ditingkat perusahaan dapat dilakukan melalui perjanjian kerja bersama, yang di dalamnya juga mengatur tentang struktur dan skala upah berikut tunjangannya. Perjanjian kerja bersama di pabrik KJ belum diatur terkait 5% uang tambahan sebagaimana dijelaskan dalam Perda, struktur skala upah dimaknai hanya sebatas tunjangan kesehatan. Perundingan upah yang diatur dalam perjanjian kerja bersama melalui proses bipartite yakni pengusaha-serikat buruh, masih belum mengatur terkait 5% uang tambahan. Menurut pak putra pembeda antara buruh yang nol tahun sampai 1 tahun hingga 10 keatas adalah terletak pada tunjangannya



seperti tunjangan kesehatan. Padahal dalam perjanjian kerja bersama, buruh bisa mengatur terkait 5% uang tambahan tersebut, Artinya tidak ada perbedaan antara buruh yang masih lajang dan keluarga dalam segi upah. Buruh yang lemah pengetahuannya terkait relasi produksi, membutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan posisi tawarnya.

Tindakan pengusaha terkait kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan mempengaruhi terhadap kesadaran buruh, yang mana pengusaha menginginkan agar buruh sepenuhnya patuh terhadap pengusaha. Konstruksi kesadaran yang dilakukan oleh pengusaha tersebut menjadikan buruh tidak memiliki kesadaran kritis melainkan hanya pada kesadaran pragmatis. Buruh menjadi takut untuk bergabung dengan serikat pekerja dikarenakan terancam untuk dintimidasi bahkan di PHK sepihak, atau buruh lebih memilih reward yang ditawarkan pengusaha daripada membangun kekuatan dalam serikat buruh. Konstruksi fikir yang dilakukan pengusaha justru mengarah pada ketidaksadaran buruh, dimana buruh digiring kesadarannya pada kesadaran semu.

### ***b. Peran Serikat Pekerja***

Serikat pekerja adalah pihak dari buruh yang cukup punya andil dalam mengkonstruksi kesadaran buruh. Serikat pekerja adalah organisasi buruh yang orientasinya untuk kepentingan buruh itu sendiri. Serikat pekerja memiliki tanggung jawab sosial untuk membawa kehidupan buruh kearah yang lebih baik. Serikat pekerja memfasilitasi dan menampung aspirasi buruh, selain itu serikat juga memiliki kewenangan dalam pengorganisasian buruh secara legal. Serikat buruh ini memiliki peranan yang strategis dalam membangun kesadaran anggotanya, melalui kelompok buruh mereproduksi pengetahuannya terkait isu-isu perburuhan sehingga menjadikan buruh berpengetahuan.

Buruh mengeksternalisasikan dirinya dalam relasi yang terbangun di serikat pekerja. Di dalam serikat, buruh menjalin interaksi sosial dengan tatanan masyarakat yang lebih kecil yakni kelompok, yang didalamnya buruh mendapatkan distribusi pengetahuan baru melalui kelompok, yang mana dari pengetahuan tersebut nantinya menciptakan kesadaran bagi buruh. Pak P awalnya memutuskan bergabung dengan serikat dengan alasan ikut-ikutan kemudian mencoba mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh FSPMI. Pak P awalnya sebagai anggota pasif, kemudian Pak P sadar bahwa ketika dia hanya sekedar ikut tanpa





mengetahui maksud dan tujuan diadakannya organisasi, maka hanya akan menjadi sia-sia. Buruh mendapatkan distribusi pengetahuan dengan mengikuti serikat, sehingga pengetahuan buruh terkait isu-isu perburuhan menjadi bertambah.

Pak D memulai bekerja sejak tahun 2008 tapi Pak D bergabung dengan serikat sejak tahun 2010. Sebelumnya, di 2 tahun awal bekerja, Pak D menjadi pekerja kontrak, yang mana bagi para pekerja kontrak tidak diperbolehkan untuk mengikuti serikat pekerja, akhirnya ketika dia diangkat menjadi pekerja tetap Pak D kemudian bergabung dengan serikat. Menurut Pak D dengan dia menjadi anggota serikat, dirinya menjadi lebih tau terkait isu-isu perburuhan, dari serikat Pak D belajar tentang regulasi dan sistem yang sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Serikat sebagai wadah dalam mengembangkan pengetahuan buruh, yang mana dari adanya penyebaran pengetahuan tersebut diharapkan mampu menjadikan buruh berfikiran kritis atas realitas sosial yang terjadi sehingga menciptakan kesadaran bagi buruh.

Proses pembangunan kesadaran buruh dalam serikat yakni melalui pendidikan, buruh diberi pemahaman melalui forum diskusi. Melalui pendidikan, buruh mendapatkan distribusi pengetahuan terkait apa saja hak-hak nya buruh, bagaimana relasi kerja, baik itu berkaitan dengan regulasi dan sistem ataupun isu-isu perburuhan yang lain. Buruh diberi pemahaman melalui proses pendidikan, yang mana dari pemahaman tersebut diharapkan mampu menciptakan kesadaran kritis bagi buruh. Pak J mencontohkan terkait kontribusi buruh dalam pajak Negara. Buruh sebelum mendapatkan gajinya terlebih dulu dipotong untuk pajak, kontribusi buruh terhadap pajak negara cukup besar . Pajak yang sebagian besar disumbang oleh buruh nyatanya masih belum memberikan kesejahteraan bagi buruh itu sendiri. Pemikiran-pemikiran kritis ini didistribusikan melalui forum diskusi di serikat, yang mana dari adanya pemikiran kritis tersebut dapat menciptakan kesadaran bagi buruh, bahwa buruh juga memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi Negara.

Serikat pekerja FSPMI mengobyektivasi buruh dengan memberikan pengetahuan terkait hak-hak buruh. Bagaimana pengetahuan itu terus direproduksi buruh sehingga mempengaruhi dunia intersubjektifnya. Menurut Berger dan Luckmann (1990:87) individu sebagai produsen dan dunia sosial sebagai produknya, artinya individu dengan dunia sosialnya berinteraksi satu sama lain, produk berbalik mempengaruhi produsennya. Pengetahuan terkait hak-hak tersebut dilembagakan dalam bentuk pendidikan. Konstruksi pengetahuan melalui pendidikan tersebut mempengaruhi kesadaran buruh, yang mana nantinya buruh mampu untuk bersikap kritis



terhadap realitas yang dihadapinya.

Kesadaran sebagai langkah awal dalam memperjuangkan kepentingan kelas buruh, dengan kesadaran buruh mampu untuk kemudian mengambil tindakan. Kesadaran ini menjadi penting karena tanpa kesadaran buruh hanya bagian dari sekelompok massa besar yang tidak memahami kondisinya. Aksi demo yang dilakukan oleh buruh sebagai bentuk dari kesadaran yang dimilikinya, buruh sadar bahwa dia berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik sehingga mengharuskan buruh untuk melakukan aksi.

Buruh tidak sekedar ikut-ikutan dalam melakukan aksi, melainkan tahu akan isu-isu yang hendak diperjuangkan, FSPMI menekankan adanya peran serta anggota dalam setiap langkah perjuangan, dimana anggota tidak hanya menjadi obyek tapi juga subyek yang sadar akan tindakannya. FSPMI tidak hanya memobilisasi massa aksi melainkan juga memberitahukan terkait isu-isu, distribusi pengetahuan tersebut dijalankan bersamaan dengan adanya instruksi aksi.

Satu minggu sebelum dilaksanakannya aksi, diadakan konsolidasi di kantor cabang dengan mengumpulkan semua ketua PUK. Konsolidasi tersebut guna untuk membahas konsep aksinya seperti apa, isu yang akan disuarakan tentang apa. Isu dan tuntutan yang diketahui melalui rapat konsolidasi kemudian oleh ketua PUK disosialisasikan kepada masing-masing korlap. Pak P adalah ketua PUK di Pabrik KJ, setelah rapat konsolidasi di kantor cabang kemudian Pak P mensosialisasikannya ke korlap-korlap yang ada di Pabrik KJ, kemudian korlap akan mensosialisasikan kepada peserta yang akan mengikuti aksi. Sosialisasi terkait isu dan tuntutan tersebut menjadi penting agar buruh yang mengikuti aksi tahu atas apa yang akan diperjuangkan, istilahnya agar buruh sadar akan tindakannya mengikuti aksi, jadi tidak sekedar ikut-ikutan.

FSPMI selain menampung aspirasi buruh, juga terdapat proses konstruksi kesadaran buruh. 9 program kerja yang dilakukan FSPMI agar buruh sadar dan *melek* akan realitas yang dihadapinya. Dalam serikat pekerja FSPMI, buruh dikonstruksi kesadarannya, kesadaran inilah yang nantinya mampu menjadikan buruh untuk mengambil tindakan. Kesadaran akan hak-hak menjadi bagian penting yang harus terbangun dalam diri buruh, maka dari itu FSPMI menjadikan pendidikan sebagai program yang memang harus terus dilaksanakan untuk



menciptakan pengetahuan berkelanjutan pada buruh.

Konstruksi pengetahuan yang dilakukan FSPMI menjadikan buruh berpengetahuan dan berkesadaran. Buruh dikonstruksi kesadarannya terkait hak-hak yang seharusnya diperoleh, sehingga menjadikan buruh bersikap kritis terhadap realitas yang dihadapinya. Konstruksi kesadaran yang dilakukan FSPMI menjadikan buruh berani dalam melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang dirasa telah melakukan ketidakadilan terhadap buruh seperti pemerintah atau pengusaha. Melalui serikat, pengetahuan buruh menjadi bertambah baik terkait hak-haknya, peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan ataupun isu-isu perburuhan lainnya. Adanya konstruksi pengetahuan yang dilakukan FSPMI menjadikan buruh lebih bersikap kritis dan lebih berani dalam melakukan perlawanan yang diwujudkan dalam gerakan aksi.

## **2. Kesadaran Kelas dalam Perjuangan Buruh**

Kesadaran kelas ini menjadi sangat penting dalam menunjang perjuangan buruh atau serikat buruh, hal ini dikarenakan kesadaran sebagai pijakan dasar sebelum menentukan strategi berjuang. Pengertian kelas menjadi sangat tidak definitif ketika dihadapkan dengan konteks yang berbeda, kelas menurut Marx (dalam Akrom 2011) dikategorikan menjadi 2 yakni kelas borjuis dan proletar yakni kelas pemilik modal dan kelas buruh. Istilah buruh ini tidak terdefiniskan secara jelas, buruh seperti apa yang dimaksud, jika definisi buruh didasarkan atas ketidakadaan modal, dan bekerja untuk orang lain, maka karyawan dan manager juga termasuk buruh karena mereka bekerja untuk orang lain. Di Indonesia istilah buruh lebih sering diidentikkan dengan pekerja yang berada pada posisi terbawah dalam struktur pekerja.

Di FSPMI buruh dikonstruksi kesadarannya agar mampu bangkit dan melawan atas ketertindasan yang dialami. Perlawanan buruh ini sebagai bentuk perjuangan kelas, yang didalamnya tidak hanya memperjuangkan kepentingan pribadi ataupun organisasi melainkan kepentingan kelas, isu yang disuarakan menyentuh ke semua kalangan buruh. Buruh harus mampu melakukan perlawanan, meskipun buruh dari kelas bawah bukan berarti buruh harus tunduk atas kebijakan yang merugikan.

Keberadaan buruh terorganisir melalui serikat, bahkan serikat buruh memiliki payung hukum tersendiri yakni Undang-Undang No 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, berbeda dengan



petani dan nelayan. Buruh harus mampu mengambil tindakan karna siapa lagi yang akan memperjuangkan nasib buruh kalau bukan buruh itu sendiri, buruh harus mampu bangkit dan melawan atas ketertindasan yang di alaminya. Pak J menitik beratkan pada pemerintah, yang mana pemerintah sebagai pihak penguasa memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi, nyatanya masih belum mensejahterakan kehidupan buruh. Sebagian besar nasib buruh dipengaruhi oleh kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, sehingga buruh melakukan tuntutan kepada pemerintah.

FSPMI Pasuruan dikenal dengan serikat yang sering melakukan aksi turun jalan, hal ini sebagai bentuk perlawanan buruh atas kebijakan yang dirasa merugikan buruh. Aksi protes ini sebagai buah dari kesadaran yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tindakan, buruh Sadar bahwa mereka juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih baik. Setiap aksi yang dilakukan FSPMI membawa kepentingan kelas, tidak membawa kepentingan pribadi apalagi kepentingan organisasi. Menurut pak A Gerakan buruh tidak melihat dari bendera tertentu, karena kekuatan buruh saat ini mengalami polarisasi dikarenakan beragamnya serikat buruh yang ada di Indonesia. Beda serikat buruh beda pula cara berjuangnya, terlebih tidak semua buruh ikut serta membangun kekuatan melalui organisasi, masih terdapat buruh yang memilih untuk tidak ikut berorganisasi.

Aksi perlawanan yang dilakukan FSPMI yakni untuk memperjuangkan kepentingan buruh secara umum tidak berdasarkan serikat tertentu ataupun pabrik tertentu. Pak A menjelaskan bahwa saat ini telah dibentuk adanya KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Meskipun buruh tidak tergabung dengan FSPMI tapi perjuangan buruh harus terorganisir melalui KSPI, KSPI ini membawahi beberapa Federasi. Isu yang disuarakan berkaitan dengan kepentingan kelas buruh bukan organisasi serikat buruh tertentu, menurut keterangan Pak Adi bahkan sekarang buruh mendapatkan jaminan pensiun, yang mana jaminan pensiun tersebut ditujukan bagi buruh yang memiliki masa kerja diatas 15 tahun. Peraturan terkait jaminan sosial yang di dalamnya juga mengatur tentang jaminan pensiun, merupakan hasil perjuangan buruh FSPMI dengan serikat buruh lain, dan juga organisasi masyarakat lain yang tergabung dalam KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) pada tahun 2010. Peraturan terkait jaminan pensiun tersebut sudah diterapkan di pabrik tempat Pak Adi bekerja yakni PT YMPI Pasuruan. Buruh yang masa kerjanya diatas 15 tahun maka berhak untuk mendapatkan jaminan pensiun, sedangkan buruh yang masa kerjanya dibawah 15 tahun maka akan



mendapatkan JHT atau Jaminan Hari Tua, yang mana perhitungannya berdasarkan uang yang disetorkan buruh. Buruh yang tergabung dalam serikat buruh FSPMI sadar bagaimana caranya meningkatkan taraf kehidupan buruh secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan dari serikat apa, bendera apa ataupun sektor apa. Serikat buruh FSPMI berjuang atas nama kelas bukan atas nama kepentingan pribadi buruh.

Dari sejumlah aksi yang dilakukan serikat buruh FSPMI, bahwa buruh tidak memperlakukan meskipun terdapat buruh lain yang tidak bergabung dengan serikat tapi ikut menikmati kebijakan yang diperjuangkan. Menurut Pak Jazuli Sangat sulit untuk berbicara tentang keadilan pada perjuangan buruh, karna tidak semua buruh bergabung dengan serikat, dan ketergabungan buruh pun tidak boleh dipaksakan. Serikat buruh FSPMI sadar bahwa kesejahteraan bersama merupakan hal penting yang harus di capai. Kepentingan kelasnya menjadi hal utama yang senantiasa dipegang teguh oleh FSPMI. Selain itu, Basis perjuangan buruh FSPMI tidak hanya untuk buruh tapi juga untuk kesejahteraan rakyat. Perubahan logo FSPMI menunjukkan bahwa serikat buruh tersebut tidak hanya berjuang untuk buruh tetapi juga rakyat.

### **3. Gerakan Buruh dan *Go Politik***

Pada masa kepemimpinan Soekarno buruh memiliki ruang gerak yang cukup luas dalam mengembangkan organisasi, bahkan buruh juga mempengaruhi kebijakan politik waktu itu. Soekarno dikenal sebagai presiden yang paling repsek terhadap gerakan buruh. Bagaimana buruh diposisikan sebagai pihak yang keterlibatannya sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Pasca jatuhnya kepemimpinan Soekarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto, buruh mengalami realitas yang sangat berbeda. Presiden Soeharto melakukan penataan ulang terhadap serikat pekerja, hal ini disebabkan gerakan buruh yang ada merupakan produk masa kepemimpinan Soekarno yang kental dengan isu komunis sayap kiri.

Menurut Launa (2011) penataan gerakan buruh setidaknya dibagi menjadi 3 fase, pertama (1966-1970) sebagai fase pelarangan terhadap segala bentuk pengorganisasian serikat buruh, karena hampir semua serikat buruh merupakan produk masa kepemimpinan orde lama. Fase kedua (1970-1990) sebagai fase pengambil alih kekuatan serikat buruh dibawah kendali militer, bahkan militer masuk ke tempat kerja, mengintervensi proses pemilihan ketua Serikat buruh. Fase ketiga (1990-1998) adalah fase dimana kebijakan ekonomi pasar menjadi kedok



pemerintah untuk mengeksploitasi segala bentuk kekuatan buruh melalui kebijakan hubungan industrial pancasila (HIP).

Era reformasi menjadi sejarah lahirnya beberapa serikat pekerja salah satunya FSPMI. Serikat buruh kemudian menyusun strategi dan kembali pada jati dirinya, dimana perjuangan buruh tidak berhenti pada masalah upah melainkan kesejahteraan bersama sebagai cita-cita luhur yang harus dicapai. Serikat buruh menyusun strategi untuk kembali terlibat dalam politik agar bisa mempengaruhi kebijakan terkait perburuhan dan hal-hal mendasar lainnya. Sikap buruh yang apatis terhadap politik perlahan mulai dimunculkan kesadaran bahwa politik itu penting, sama pentingnya dengan perjuangan yang selama ini dilakukan.

Dalam serikat buruh diberikan kesadaran politik karna menurut pak J kehidupan buruh tidak terlepas dari manuver politik. Keterlibatan buruh dalam politik dianggap sangat penting karna kehidupan buruh tidak terlepas dari politik seperti penentuan upah, jaminan sosial dan lain sebagainya. FSPMI mulai membangun strategi politik, tetapi politik yang dimaksud adalah politik. kesejahteraan bukan politik praktis, artinya politik yang dibangun oleh FSPMI tidak orientasi materi melainkan untuk kesejahteraan sosial. Buruh menyebutnya politik alternatif.

Pada kongres bulan Februari kemarin, sudah diluncurkan adanya buruh “*go politik*”, keterlibatan buruh dalam politik dirasa perlu karena sebagian besar nasib buruh dipengaruhi oleh kebijakan, yang mana kebijakan tersebut didapatkan melalui proses politik. Hal demikian mau-tidak mau menjadikan buruh untuk terlibat dalam dunia politik agar bisa mempengaruhi kebijakan. Menurut Pak A selama ini mindset yang ditangkap oleh buruh tentang politik selalu mencitrakan buruk, dimana politik dianggap kotor, mindset tersebut perlahan mulai diperbaharui bahwa politik itu penting untuk kehidupan buruh. Mindset tentang pentingnya politik mulai diturunkan hingga ke tingkat grassoot.

Sosialisasi mengenai pentingnya politik dilakukan oleh pak A melalui media sosial seperti bbm, whatsapp dan facebook, dalam media sosial tersebut dijelaskan secara lengkap mengenai kenapa harus diluncurkan buruh go politik. Menurut Iqbal (2015:83) sebelum serikat buruh memutuskan untuk masuk dalam konstelasi politik, serikat buruh harus melalui 3 tahapan yakni pengorganisasian, peng-idiologisan, dan pendirian partai politik. Iqbal yang merupakan Presiden FSPMI mengatakan bahwa keterlibatan politik harus juga menyertakan kaum marginal yang lain, berikut step-step yang harus dilalui serikat buruh ketika memutuskan



untuk terlibat dalam politik:

Pertama-tama, dibentuk sebuah tim independen yang meluas untuk menyebarkan kuesioner pendapat ke sejumlah buruh, tani, nelayan dan agamawan tentang perlukah adanya saluran politik bagi mereka, jika memang perlu maka langkah kedua adalah mendorong bersatunya serikat buruh yang ada (karna mereka merupakan organisasi kader yang sudah tertata) untuk mengadakan konvensi nasional diperluas tentang perlukah dibentuk partai buruh, bila mana dirasa perlu maka langkah ketiga adalah diadakan referendum nasional oleh tim yang dibentuk untuk itu, tim inilah yang akan menanyakan ke seluruh elemen masyarakat terkait setuju tidaknya membentuk partai politik, langkah ke empat adalah bila mayoritas menyatakan setuju maka dibentuklah pengurus dan struktur partai yang juga melibatkan elemen gerakan sosial yang lain, dan langkah yang terakhir adalah setelah partai buruh terbentuk, selanjutnya serikat buruh kembali bergerak diranah sosial ekonomi yang bersifat independen, bukan menjadi underbow partai (Iqbal, 2015:92).

Jhon Ingleson (dalam Iqbal 2015:87) menjelaskan bahwa pemimpin serikat buruh mengalami pertanyaan yang fundamental. Haruskah mereka membatasi aktivitas mereka pada urusan industrial: upah dan kondisi kerja, praktik kecurangan, kesehatan dan isu keamanan sehingga bisa meminimalkan risiko sikap represif pemerintah, ataukah harus mencari usaha mengintegrasikan gerakan buruh ke dalam gerakan politik nasionalis yang lebih kuat, menguji batas kekuasaan Negara dalam rangka menguatkan gerakan nasional secara keseluruhan?

Perdebatan tentang pentingnya keterlibatan buruh dalam politik sudah dimulai sejak tahun 1920-1930. Menurut Iqbal (2015:87) hubungan organisasi yang erat antara partai politik dan serikat buruh merupakan agenda yang sama besarnya dengan agenda serikat buruh sebagaimana upah dan kondisi kerja. Keterlibatan buruh dalam politik tersebut dimaksudkan agar buruh bisa mempengaruhi kebijakan Negara.

Menurut Iqbal pilihan yang terakhir merupakan pilihan yang paling ideal, hanya saja membutuhkan persayaratan yang sangat ketat. Dalam perkembangannya pasca reformasi, buruh atau serikat buruh sudah terlibat dalam aktivitas politik sejak pemilu tahun 2004, bahkan pada pemilu tahun 2014 dimana serikat buruh FSPMI mendukung bakal calon presiden tertentu untuk memperjuangkan aspirasinya, buruh atau serikat buruh sangat mendukung bakal calon presiden tersebut bahkan ikut mengkampanyekan. Buruh melakukan kontrak politik dengan partai Gerindra, yang mana bakal calon presiden dari partai tersebut harus menyetujui dan



memperjuangkan terkait 10 tuntutan rakyat yang disebut sepultura (Iqbal, 2015:108) pada kongres FSPMI di bulan Februari kemarin, diluncurkan buruh *Go Politik* bahkan buruh berniat untuk mendirikan partai politik berdasarkan organisasi masyarakat.

FSPMI berniat untuk membentuk ormas atau organisasi masyarakat di semua wilayah FSPMI, ormas-ormas ini yang nantinya mampu menciptakan partai politik bagi buruh. Nampaknya FSPMI mulai menggunakan cara berpolitik yang ketiga, dimana buruh mendirikan partai politiknya sendiri. Pilihan ini merupakan pilihan yang paling ideal diantara keduanya, karena ketika buruh bergabung dengan partai politik lain seringkali buruh hanya dijadikan kuda pacuan, yang keberadaannya untuk memenangkan partai politik tersebut, mengingat massa buruh tidak sedikit sehingga cukup menguntungkan bagi partai politik tersebut. Kesadaran politik serikat buruh FSPMI tidak hanya ditunjukkan dengan keterlibatannya dalam pemilihan umum (pemilu), yang dalam prakteknya FSPMI melakukan afiliasi dengan partai politik tertentu ataupun membentuk partai politik, tetapi serikat pekerja FSPMI juga melakukan komunikasi dan diskusi politik dalam penentuan kebijakan.

Pada tanggal 1 Mei 2016, peneliti berkesempatan untuk mengikuti FGD (Focus Group Discussion) yang diadakan oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dengan serikat buruh FSPMI. Diskusi yang mengangkat tema Raperda Perlindungan Pekerja, bertepatan dengan aksi *May Day* yang menuntut adanya Perda Perlindungan buruh di Jawa Timur. Buruh menagih janji Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo untuk segera mengesahkan Perda Perlindungan pekerja. Diskusi ini diadakan oleh Arif Hari Setiawan yang menjabat sebagai ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Timur.

Memperlihatkan saat FGD (Focus Group Discussion) Partai PKS dengan Serikat buruh di Surabaya. Tema yang diangkat dalam diskusi politik tersebut —Raperda Perlindungan Pekerja disesuaikan dengan moment *May Day* buruh, yang mana dalam *May Day* buruh menagih janji Gubernur Jawa Timur untuk segera mengesahkan Perda Perlindungan pekerja. Relasi yang terbangun dalam diskusi tersebut, FSPMI bukan hanya menyampaikan aspirasi tetapi juga melibatkan partai politik dalam memperjuangkan kepentingannya di Dewan Perwakilan Daerah. FSPMI melakukan diskusi politik dengan siapa saja partai yang memiliki tujuan yang sama dan mau memperjuangkan aspirasi buruh.

Diskusi ini dihadiri oleh bapak HS, dosen hukum dari Universitas Airlangga. Peserta dari





diskusi tersebut adalah buruh dan serikat buruh, anggota DPRD IX dan mahasiswa. Sebelum dilakukannya tanya jawab, terlebih dulu mendengarkan penyampaian meteri dari Pak A selaku perwakilan dari partai politik PKS, kemudian Pak H perwakilan dari Akademisi, dan Pak J perwakilan dari buruh. Diskusi ini guna membahas penting adanya Raperda perlindungan buruh di Jawa Timur, mengingat sekarang Indonesia memasuki tahun MEA sehingga dikawatirkan adanya serbuan tenaga kerja asing. Dalam diskusi tersebut, bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat mendukung adanya Peraturan Daerah tentang perlindungan pekerja, dan akan memperjuangkan kepentingan buruh dalam ranah politik.

#### 4. Peran FSPMI dalam Memobilisasi dan Membangun Kesadaran Massa Aksi

Aksi demo buruh tidak terlepas dari keberadaan massa yang banyak. Kuantitas massa aksi merefleksikan dari kekuatan aksi itu sendiri, semakin banyak massa semakin kuat pula aksi yang dilakukan, dan semakin banyak massa menunjukkan bahwa isu atau tuntutan tersebut menyangkut hajat orang banyak. Gerakan sosial buruh tidak terlepas dari adanya proses mobilisasi massa, yang mana gerakan buruh tersebut merupakan perilaku kolektive massa bukan perilaku pribadi individu. Dalam proses mobilisasi diperlukan adanya sinergitas antara elite organisasi dengan anggota, sehingga massa aksi dapat terorganisir dengan baik. Proses mobilisasi harus terorganisir dari tingkat atas hingga ketingkat *grassroot*. Mobilisasi tersebut juga tidak terlepas dari peran pemimpin serikat buruh selaku pengambil keputusan.

Aksi mogok buruh dibedakan menjadi 2 yakni MONAS mogok nasional dan MODAR mogok daerah, apabila aksi tersebut sifatnya skala nasional maka instruksi aksi datangnya dari pusat yakni DPP (Dewan Pimpinan Pusat), tapi apabila aksi tersebut membawakan isu atau tuntutan ditingkat Daerah maka instruksi aksi datang dari DPW (Dewan Pimpinan Cabang) atau KC (Konsulat Cabang). Instruksi aksi tersebut berdasarkan isu dan tuntutan yang akan disuarakan, apabila isu dan tuntutannya menyangkut daerah seperti Kabupaten maka instruksi Apabila isu dan tuntutannya berkaitan dengan kedaerahan seperti Kabupaten maka instruksi aksi datangnya dari KC, kemudian dari KC mengkonsolidasikan dengan beberapa PUK yang ada di Daerah tersebut, di Kabupaten Pasuruan sendiri terdapat 25 PUK anggota FSPMI. Instruksi aksi ini terpola dari tingkat pusat hingga ke Daerah. Menurut Pak A FSPMI adalah organisasi yang sifatnya hierarki yang mana ketika pusat mengatakan A maka hingga ketingkat *grassroot* pun mengatakan A seperti contoh aksi penuntutan UMK, dari tingkat pusat kemudian turun ke DPW setelah itu ketingkat KC, PC dan PUK.



Menurut keterangan pak P pernah dalam suatu aksi yang dilaksanakan FSPMI menjadi anarkis, yang mana di dalamnya terdapat provokator yang dengan sengaja membuat aksi menjadi ricuh, namun ketika ditanya tentang tanda pengenal anggota provokator tersebut tidak bisa menunjukkannya, hal ini memperlihatkan bahwa terdapat orang luar yang dengan sengaja menjadi provokator untuk mencitrakan buruk tentang aksi FSPMI. Setiap anggota FSPMI selalu dibekali dengan tanda anggota, yang mana tanda anggota tersebut diharuskan untuk dibawa kemanapun buruh pergi sebagai bentuk identitas bahwa buruh merupakan anggota FSPMI.

FSPMI dalam pelaksanaan aksinya tidak hanya memobilisir massa tetapi juga membangun kesadaran massa aksi, yakni dengan menjelaskan terkait isu dan tuntutan yang hendak disuarakan. Dari tingkat pusat hingga grassroots tau akan isu dan tuntutan, hal ini bertujuan agar buruh tidak sekedar ikut-ikutan dalam pelaksanaan aksi tetapi juga mengetahui terkait apa yang akan diperjuangkan. FSPMI yang memiliki kewenangan memobilisir massa, tidak hanya menjadikan buruh sebagai obyek yang keberadaannya untuk melengkapi aksi, melainkan juga sebagai subyek yang keterlibatannya berdasarkan pengetahuan terhadap tujuan dan maksud diadakannya aksi. FSPMI memberikan akses informasi terkait isu dan tuntutan tersebut, sehingga buruh menjadi sadar dan tahu akan tujuan mereka melakukan aksi. Kesadaran buruh dalam aksi ini menjadi penting karena untuk mengukur totalitas dan penghayatan buruh dalam mengikuti aksi, yakni buruh tau akan isu dan tuntutan yang hendak disuarakan. Konstruksi pengetahuan buruh terkait isu dan tuntutan tersebut yang nantinya menjadikan buruh sadar bahwa diadakannya aksi tidak lain untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka.

Adanya mobilisasi massa aksi dari tingkat pusat hingga grassroots dibarengi dengan distribusi pengetahuan terkait isu dan tuntutan. DPP memberikan instruksi aksi ke DPW bersamaan dengan alasan kenapa diadakannya aksi, isu dan tuntutan apa saja yang akan disuarakan dalam aksi. Kemudian DPW menginstruksikan aksi kepada KC beserta isu dan tuntutan. KC kemudian mengumpulkan pengurus PC dan ketua PUK, memberitahukan terkait isu dan tuntutan melalui rapat konsolidasi. Selanjutnya dari PUK mengumpulkan pengurus dan korlap ditingkat perusahaan, untuk menginstruksikan aksi beserta apa saja isu dan tuntutan yang akan disuarakan. Korlap bertanggung jawab menginformasikan terkait isu dan tuntutan tersebut kepada anggota yang mengikuti aksi. Apabila isunya bersifat wilayah maka pemberitahuan terkait isu dan tuntutan dilakukan sebagaimana step-step dijalankannya instruksi aksi.



Terkadang FSPMI juga membuat selebaran terkait isu dan tuntutan yang hendak disuarakan.

Sosialisasi terkait isu dan tuntutan yang hendak diperjuangkan terkadang dilakukan melalui selebaran-selebaran yang di dalamnya dijelaskan terkait isu dan alasan dilaksanakannya aksi. Hal ini bertujuan agar peserta aksi mengetahui dengan jelas terkait tuntutan yang akan disuarakan, jadi pembertitahuan terkait tuntutannya ada yang bersifat face to face, korlap ke anggota, ada yang melalui selebaran. Realitas yang dihadapi buruh dalam dunia kerja juga berperan penting dalam membangun kesadaran buruh, yang mana buruh memiliki posisi tawar yang rendah ketika dihadapkan dengan regulasi atau kebijakan yang berada di pabrik, sehingga buruh merasa penting untuk melakukan aksi sebagai bentuk perjuangan akan hak-hak dan kepentingan mereka.

Ketika keluar instruksi aksi, buruh akan sadar dengan sendirinya, bahwa aksi tersebut untuk memperjuangkan hak-hak mereka, buruh sadar mereka yang berjuang maka mereka yang akan mendapatkan hasil. Buruh tidak dibayar dalam pelaksanaan aksi karena buruh tau, aksi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri, orientasi buruh melakukan aksi tidak berdasarkan materi melainkan lebih kepada kepentingan, buruh menyadari bahwa siapa lagi yang akan memperjuangkan nasib mereka kalau bukan mereka sendiri.

Dorongan buruh melakukan aksi lebih kepada sesuatu hal yang sifatnya harus mereka perjuangkan yakni hak. Hak-hak inilah yang mendasari buruh melakukan aksi, bahwa buruh sebagai kaum tertindas tidak akan berdiam diri atas buruknya sistem dan kinerja pemerintahan. Buruh sadar bahwa kemiskinan yang mereka derita bukan karena takdir tetapi karena buruknya regulasi perburuhan. Melalui kelompok buruh membangun kekuatan dalam memperjuangkan hak. Buruh tidak merasa dirugikan dengan mengikuti aksi lantaran mereka harus merelakan jam kerjanya, melainkan buruh sadar bahwa aksi tersebut untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri, bahkan buruh menggunakan hak cuti dalam melaksanakan aksi, hak cuti yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan pribadi tetapi buruh menggunakannya untuk pelaksanaan aksi.

Dalam pelaksanaan aksi solidaritas yang mana isu dan tuntutannya tidak berkaitan langsung dengan semua peserta aksi, tetapi buruh merasa penting untuk melakukannya. Hal ini merupakan bagian dari nilai-nilai yang ditanamkan dalam FSPMI yakni solidaritas tanpa batas.



Selain membangun kekuatan untuk memperjuangkan hak, FSPMI juga merasa penting untuk membangun solidaritas sesama buruh. Semua peserta aksi solidaritas dipastikan tau akan isu dan tuntutan yang akan diperjuangkan. Keterlibatan buruh dalam aksi solidaritas tersebut yakni mereka sadar bahwa keikutsertaan mereka dalam aksi dapat menambah kekuatan aksi. Buruh sadar keterlibatan mereka dalam aksi sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama anggota kelompok.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat proses pembangunan kesadaran dalam serikat pekerja FSPMI. Kesadaran ini menjadikan FSPMI tidak hanya memiliki kesadaran kelas tapi juga kesadaran politik, yang mana FSPMI mampu untuk memobilisir dan mengorganisasikan buruh untuk memperjuangkan hak-hak nya melau aksi. Pengorganisasian dan mobilisir buruh ini menjadi sinergis ketika buruh tahu bahwa aksi tersebut untuk memperjuangkan haknya. Dalam FSPMI, buruh dikonstruksi kesadarannya terkait apa saja hak-haknya buruh melalui pendidikan, ketika buruh sudah terkonstruksi kesadarannya terkait hak dan kewajiban, maka kesadaran tersebut akan berkembang menjadi kesadaran kelas dan gender. Kemudian buruh akan memutuskan untuk mengambil tindakan melalui politik pengorganisasian dalam memperjuangkan haknya. Kesadaran politik yang dimiliki FSPMI tidak hanya melalui pengorganisasian buruh, melainkan sekarang FSPMI memiliki niatan untuk terlibat dalam partai politik, sehingga bisa secara langsung memperngaruhi kebijakan publik.

FSPMI tidak serta merta melaksanakan aksi melainkan sudah melalui beberapa tahapan tertentu, mereka menyebutnya KLA konsep-lobby-aksi. FSPMI dalam pelaksanaan aksinya tidak hanya memobilisir massa tetapi juga membangun kesadaran massa aksi, yakni dengan menjelaskan terkait isu dan tuntutan yang hendak disuarakan. FSPMI menekankan adanya peran serta anggota dalam setiap langkah perjuangan, dimana anggota tidak hanya menjadi obyek tapi juga subyek yang sadar akan tindakannya. Distribusi pengetahuan terkait isu dan tuntutan tersebut bertujuan agar buruh tidak sekedar ikut-ikutan dalam pelaksanaan aksi tetapi juga mengetahui terkait apa yang akan diperjuangkan.

### **Daftar Pustaka**



- Andito. 2012. *Buruh Bergerak : membangun kesadaran kelas*. Jakarta. Friedrich Ebert Stiftung
- Berger, Peter L dan Luckman Thomas. *Tafsir Sosial atas Kenyataan : sebuah risalah tentang sosiologi pengetahuan*. Terjemahan oleh Hasan Basari. 1990. Jakarta. LP3ES
- Flaherty, Michael G. (2009). Fenomenologi. Dalam: Bryan s. Turner (Ed). *Teori Sosial dari Klasik Sampai Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, Said. 2015. *Gagasan Besar Serikat Buruh*. Yogyakarta. PT Leutika Nouvalitera
- Lofland, Jhon. 2003. *Protes*. Yogyakarta. Insist Press
- Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2016. BPS Kabupaten Pasuruan. Publikasi
- Maliki, Zainuddin . 2012. *Teori Sosial Modern*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Marx, Karl dan Engels, Friedrich. *Manifesto Partai Komunis*. Terjemahan oleh D.N.Aidit dkk. 2014. Yogyakarta. Cakrawangsa Yogyakarta
- Moleong, J.Lexy. 2004. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda
- Poedjawijatna, 1986. *Etika : Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta. Bina Aksara
- Poloma, Margaret M. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial*. Yogyakarta. PT Tiara Yogya
- Sandra. 2007. *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia*. Jakarta. Trade Union Rights Center
- Sitorus, MT Felix. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor. Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sumanto. 2014. *Hubungan Industrial*. Jakarta. Centre of Academic Publishing Service
- Sztompka, P. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta. Prenada
- Tambunan, Rita O. 2014. *Pendidikan Bagi Buruh Menuju Kesadaran Politik.. Dalam : Kebangkitan Gerakan Buruh : refleksi era reformasi Kelas Jakarta*. TURC
- Tedjasukmana, I. 2008. *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*. Jakarta. Trade Union Rights Centre
- Tjandraningsih, I dan Herawati, R. 2009. *Menuju Upah Layak (Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia)*. Jakarta. Friedrich Ebert Stiftung

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum



Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 13 tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 22 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan

### **Jurnal**

Akrom, 2011. Prespektif Karl Marx tentang Kelas Sosial. *Jurnal Primary*. 3 (1) 109-115

Amin, Muryanto. 2011. Fragmentasi Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Politik*. 3 (1): 47-56

Iqbal, Said. 2011. Buruh dan Politik. *Jurnal Sosial Demokrasi*. 10 (4): 54-61

Launa. 2011. Buruh dan Politik *Labour and Politics*. *Jurnal Sosial Demokrasi*. 10 (4): 4-15  
Meretas Kesadaran Merajut Ideologi. 10 (4): 70-77

Haq, Yusfia A. 2015. Upaya Perempuan Aktivistis Buruh Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Normative Buruh Perempuan di Perusahaan Dalam Negeri Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Politik muda*. 4 (1):13-20

Hendrastomo, Grendi. 2010. Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi. *Jurnal Informasi*. 16 (2):1-17

Setiawan, Ade. 2012. Gerakan Serikat Buruh : gerakan penolakan/penuntutan revisi ranperda ketenagakerjaan 2011 oleh serikat buruh di Kabupaten Gresik. *Jurnal Politik Muda*. 1 (1)

Vidi, Muhammad RA dan Affandi Muhammad. 2015. Gerakan Perlawanan Serikat Buruh dalam Sistem Outsourcing dan Sistem Pengupahan di PT JAPFA Comfeed Sidoarjo. *Jurnal Paradigma*,3(1):1-8

Winata, Ria A. 2015. Gerakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Dalam Memperjuangkan Penolakan Sistem Outsourcing di Kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal Politik Muda*, 4(3):259-267

### **Skripsi**



- Syahputra, Ganda. 2009. *Peranan Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Upah dan Politik (Studi Kasus Serikat Buruh Medan Indonesia)*. Skripsi. Medan.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
- Wisnutomo, N H. 2014. *Peran Serikat Pekerja Dalam Penetapan Upah Minimum Buruh dan Penyelesaian Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
- Wulandari, Bety. 2014. *Bentuk-Bentuk Protes Karyawan Terhadap Manajemen Pabrik Kertas Leces*. Skripsi.Jember: Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

### Internet

- Handik, Andi. 2015. Gaji di bawah UMSK, Buruh PT Nestle Datangi Disnaker. <http://www.timesindonesia.co.id/baca/103654/20150831/120354/gaji-di-bawah-umsk-buruh-pt-nestle-datangi-disnaker/> [ 17 Desember 2015]
- Hartik, Andi. 2015. Bupati Akan Panggil PT Halim Jaya Sakti Terkait Persoalan Buruh.<http://beta.timesindonesia.co.id/baca/103178/20150819/112236/bupati-akan-panggil-pihak-pt-halim-jaya-sakti-terkait-persoalan-buruh/> [17 Desember 2015]
- Hujjah, S. 2015. Dalam Sehari, Ratusan Buruh Pasuruan Demo di Tiga Lokasi. [http://beritajatim.com/peristiwa/242464/dalam\\_sehari\\_ratusan\\_buruh\\_pasuruan\\_demo%20di\\_tiga\\_lokasi.html#.VnNEaGdRZ8Q](http://beritajatim.com/peristiwa/242464/dalam_sehari_ratusan_buruh_pasuruan_demo%20di_tiga_lokasi.html#.VnNEaGdRZ8Q) [17 Desember 2015]
- Hujjah, Shohibul. 2015. Ratusan Buruh Sarbumusi Datangi Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. [http://beritajatim.com/peristiwa/253071/ratusan\\_buruh\\_sarbumusi\\_datangi\\_kantor\\_dprd\\_kabupaten\\_pasuruan.html](http://beritajatim.com/peristiwa/253071/ratusan_buruh_sarbumusi_datangi_kantor_dprd_kabupaten_pasuruan.html) [17 Desember 2015]
- Marza, Ade. 2015. Tak digaji 3 Bulan, Buruh Demo di Pasuruan. <http://solidaritas.net/2015/04/tak-digaji-3-bulan-buruh-demo-di-pasuruan.html>
- Syairwan, Irwan. 2015. Buruh Pasuruan Tuntut Keberadaan PHI. <http://surabaya.tribunnews.com/2015/05/01/buruh-pasuruan-tuntut-keberadaan-phi> [17 Desember 2015]
- Yoenianto, Arie. 2015. Demo Buruh Lumpuhkan Surabaya-Malang. <http://daerah.sindonews.com/read/974338/151/demo-buruh-lumpuhkan-surabaya-malang-1425954397> [17 Desember 2015]



(<http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/ribuan-buruh-jatim-tolak-rencana-pemerintah-tetapkan-rpp-pengupahan>) diakses 17 Desember 2015

